



Penda Kapuas Hulu Raih Opini WTP

PUTUSSIBAU - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut diungkapkan Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, kemarin.

Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan, berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Barat Nomor: 25.B/S-HP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, perihal hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2018, Kapuas Hulu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Alhamdulillah saat ini laporan keuangan kita tahun 2018 mendapat opini WTP. Ini berkat kerja keras kita semua, sebab itu saya sampaikan terima kasih

kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh OPD atas keberhasilan mempertahankan opini ini," ujarnya.

Untuk diketahui, dengan prestasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara berturut-turut sebanyak dua kali memperoleh opini WTP. Hal ini karena laporan keuangan Kapuas Hulu telah sesuai dengan standar akuntasi pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan.

"Jadi anggaran Kapuas Hulu tahun 2018 itu ada dua tahap pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Kalbar, pemeriksaan pendahuluan dilakukan selama 20 hari dan dilanjutkan pemeriksaan terinci selama 30 hari," katanya.

Laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK RI Perwakilan Kalbar terdapat tiga struktural pokok yaitu pendapatan, belanja, dan pembayaran daerah. Total pendapatan Kapuas Hulu setelah perubahan sebesar



ISTIMEWA
SERAH DRAFT: Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyerahkan draf Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Rajuliansyah, kemarin.

dewan (DPRD, Red) yang terhormat sebagai representasi dari masyarakat Kapuas Hulu. Masukan tersebut sangat berguna bagi kami untuk menjalankan roda pemerintahan di Kapuas Hulu," jelasnya.

Sidang Paripurna tersebut digelar DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah. Selain dihadiri Bupati Abang Muhammad Nasir, juga dihadiri jajaran Forum Komu-

niksi Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah yang ada di Kapuas Hulu.

Raporda Pertanggung-

jawaban Anggaran 2018 ini, apabila telah disepakati Eksekutif dan Legislatif Kapuas Hulu, maka akan dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Barat. Setelah proses evaluasi tersebut, baru kemudian ditetapkan kembali sebagai Perda Kapuas Hulu tahun 2019. (arf)